
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL DI KOTA MANADO

THE INFLUENCES OF THE LOCAL REVENUES AND SPECIAL ALLOCATION FUNDS TO THE CAPITAL EXPENDITURE BUDGET ALLOCATION IN MANADO CITY

Yunistin Ndede¹, Jullie J. Sondakh², dan Winston Pontoh³

*^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi Manado 95115, Indonesia
Email: ¹yunistinndede@yahoo.com*

ABSTRAK

Otonomi Daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk lebih mandiri, tidak terkecuali mandiri dalam hal finansial. Untuk itu, pemerintah daerah harus mendapatkan dukungan dari sumber-sumber keuangan yang berasal dari Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pinjaman Daerah, dan lain-lain dari pendapatan yang sah, yang diharapkan dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah. Penelitian ini dilakukan di Kota Manado, dimana dalam penelitian ini tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal untuk periode 2008–2014. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal di Kota Manado. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan atau secara bersama-sama pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus agar dapat berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah Kota Manado.

Kata Kunci : PAD, DAK, Belanja Modal

ABSTARCT

Regional autonomy would require local government to be more independent, not least financially independent. To that end, the local government must have the support of the financial resources derived from the Balance Fund, Local Revenue (PAD), Regional Loan, and other than legitimate income, which is expected to be used effectively and efficiently by local governments. This research was conducted in the Manado city, which in this study on the influence of local revenues and special allocation funds towards capital expenditure for the period 2008-2014. The purpose of this study was to determine how much influence the local revenue and special allocation funds towards capital expenditure budget allocation in the city of Manado. Data analysis method used is multiple linear regression analysis method. The results showed that simultaneous or jointly-source revenue and special allocation funds that can significantly influence capital expenditure in Manado city government.

Keywords : PAD, DAK, Capital Expenditure

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (PEMDA) yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit bantuan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah (Raharjo, 2012).

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 pasal 157 menyatakan bahwa salah satu pendapatan daerah adalah Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Pemanfaatan belanja lebih baik dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan, kemudian penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik, pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik (Darwanto, 2007).

Serapan belanja modal pemerintah yang masih sangat rendah saat ini akan memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Jika serapan belanja modal kecil, akan memengaruhi kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemampuan bersaing industri dan pengusaha kita, khususnya di Indonesia kawasan Timur. Rendahnya penyerapan belanja terutama disebabkan oleh masih minimnya belanja Kementerian Negara/Lembaga terutama pada belanja barang dan belanja modal. Penyerapan yang rendah terhadap kedua jenis belanja ini berimplikasi negatif pada perkembangan perekonomian dan penyediaan infrastruktur publik. Banyak pihak menyampaikan bahwa hal ini mengakibatkan berkurangnya alokasi untuk belanja modal yang dipandang lebih mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemenuhan pelayanan publik kepada masyarakat (Dirtjen Perimbangan Keuangan, 2012). Melihat adanya kondisi belanja modal dalam APBD di pemerintah Provinsi di Indonesia kurang diperhatikan, pemerintah daerah seharusnya dapat mengalokasikan APBDnya untuk belanja modal dan tidak habis digunakan untuk belanja pegawai dan belanja rutin. Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah. Untuk mengembangkan potensi daerah tersebut maka pemerintah daerah perlu meningkatkan anggaran belanja modal, sumber-sumber dana yang digunakan untuk membiayai belanja modal tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pemerintah Daerah yang berhasil menjalankan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan mengelola APBD secara efektif dan efisien. Sebaliknya, pengelolaan APBD yang buruk dapat menghambat kinerja pemda dalam peningkatan pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Persoalan yang muncul adalah saat pemda dihadapkan pada jumlah belanja daerah yang kecil tetapi harus menanggung kebutuhan besar. Sementara pada saat bersamaan pemda kurang memiliki kreativitas mengelola APBD, sehingga pemerintah pada jenjang di atasnya (pemprov atau pusat) tidak optimal dalam mengelola APBD. Pada saat yang bersamaan jumlah pendapatan daerah meningkat baik dari pendapatan asli daerah maupun dana transfer tetap saja belanja daerah belum mampu secara optimal meningkatkan kondisi infrastruktur di daerah tersebut. Dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah selain DAU adalah DAK yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan

khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 Tahun 2004).

Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian yang dikemukakan pada latar belakang penelitian, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Alokasi Belanja Modal.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Alokasi Belanja Modal.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Alokasi Belanja Modal.

Tinjauan Pustaka

Definisi Akuntansi

Akuntansi merupakan suatu kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan, dari suatu lembaga atau perusahaan yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi diantara berbagai alternatif tindakan. (Sugiono, 2014). Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu badan usaha (Rudianto, 2012). Akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan (Horngren, 2010; Harrison, 2010). Dalam struktur pemerintahan daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban menyelenggarakan akuntansi atas transaksi-transaksi pendapatan, belanja, asset dan selain kas yang terjadi di lingkungan satuan kerja. Pada tingkat pemerintah daerah, satuan kerja yang bertanggung jawab menyelenggarakan akuntansi adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik dapat didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara (Mardiasmo, 2009). Ruang lingkup akuntansi sektor publik meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unit-unit kerja pemerintah) organisasi sukarelawan, rumah sakit, perguruan tinggi dan universitas, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi politik, dan sebagainya (Sugiono, 2015). Akuntansi Keuangan Daerah adalah serangkaian kegiatan pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, penguraian, peringkasan, penyajian atau pelaporan data keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Mahsun, 2013).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya

keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus merupakan dana yang dialokasikan dari APBN ke daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga prioritas nasional antara lain: kebutuhan kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi atau prasarana, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dan lain-lain.

Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin (Uhise, 2013). Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran, Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

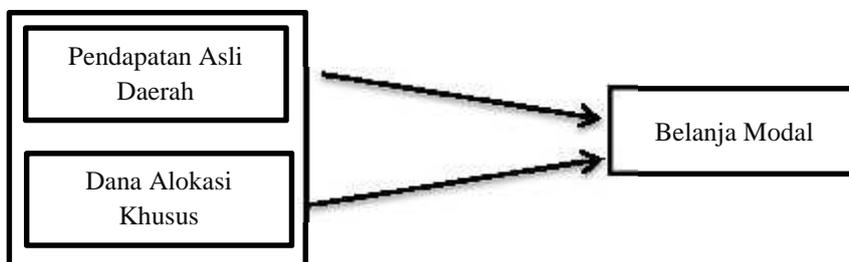
Kerangka Berfikir

Hubungan Antara PAD dengan Belanja Modal

PAD merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. PAD didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Untuk itu, dalam masa desentralisasi seperti ini, pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan PAD-nya masing-masing dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki supaya bisa membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada APBD.

Hubungan DAK terhadap Belanja Modal

Dana perimbangan merupakan perwujudan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu dana perimbangan adalah DAK, yaitu merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional.



Gambar 1. Kerangka Berfikir
Sumber: Studi Pustaka, 2016

Hipotesis

Berdasarkan kerangka berfikir yang telah disajikan tersebut, maka hipotesis penelitian yang dapat disimpulkan dari asumsi diatas adalah sebagai berikut :

- H_{01} : Diduga Pendapatan Asli Daerah (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Y) di Kota Manado.
- H_{02} : Diduga Dana Alokasi Khusus (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Y) di Kota Manado.
- H_a : Diduga Pendapatan Asli Daerah (X_1) dan Dana Alokasi Khusus (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Y) di Kota Manado.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian Kuantitatif, dimana merupakan sebuah penyelidikan tentang masalah sosial berdasarkan pada pengujian sebuah teori yang terdiri dari variable-variabel.

Objek Penelitian

Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado (DISPENDA), yakni Kantor yang mengelolah semua Pendapatan Daerah Kota Manado. DISPENDA berlokasi di Jln. 17 Agustus No.5 Manado. Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan April 2016.

Prosedur Penelitian

Prosedur Penelitian yang dilakukan dalam skripsi adalah dengan Mendefinisikan dan Merumuskan Masalah.Selanjutnya melakukan studi kepustakaan (Studi Pendahuluan). Lalu merumuskan Hipotesis yang merupakan pernyataan atau anggapan yang sifatnya sementara tentang fenomena yang akan diselidiki sehingga bisa menentukan Model atau Desain Penelitian. Selanjutnya mengumpulkan Data dengan melakukan observasi atau kunjungan langsung pada objek penelitian. Sehingga kita bisa menganalisis dan menginterpretasikan lebih lanjut dengan menggunakan alat-alat analisis yang sesuai. Dan tahap terakhir adalah membuat kesimpulan sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Saran disajikan pula karena penelitian mempunyai keterbatasan-keterbatasan atau asumsi-asumsi.

Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Data merupakan hasil pengamatan dan pengukuran empiris yang mengungkapkan fakta tentang karakteristik dari suatu gejala tertentu. Diantaranya:

1. Data Kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka).
2. Data Kualitatif adalah data yang bersifat deskriptif atau berbentuk uraian/ penjelasan-penjelasan.

Sumber Data

Berdasarkan sumber pengambilannya, data dibedakan atas dua, yaitu Data Primer dan Data Sekunder.

1. Data Primer, suatu objek atau dokumen original-material mentah dari perilaku yang disebut "*first-hand information*".
2. Data Sekunder, data yang dikumpulkan dari tangan kedua "*second-hand information*".

**Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Pendapatan Asli Daerah (X₁)**

PAD merupakan sumber keuangan pemerintah provinsi se-Indonesia dari tahun 2012 yang digali dari dalam wilayah daerah dan terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan daerah yang sah. Pengukuran variabel PAD ini diukur dengan skala rasio. PAD dapat diukur dengan perhitungan:

$$\text{PAD} = \text{Total pajak daerah} + \text{total retribusi daerah} + \text{total hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan} + \text{lain-lain pendapatan daerah yang sah}$$

Dana Alokasi Khusus (X₂)

DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK untuk masing-masing pemerintah provinsi dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD (Gugus, 2013).

Belanja Modal (Y)

Belanja modal merupakan belanja langsung yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi se-Indonesia tahun 2012 untuk membiayai kegiatan investasi. Pengukuran variabel belanja modal ini diukur dengan skala rasio. Belanja modal dapat diukur dengan perhitungan:

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Lainnya.}$$

**Metode Analisis
Teknik Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi linear berganda yang adalah analisis yang digunakan untuk mempelajari cara bagaimana variabel-variabel yang ada itu saling berhubungan. Variabel dependennya adalah belanja modal dan variabel-variabel Independennya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK). Untuk menguji apakah ada korelasi dan pengaruh dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen maka digunakan metode regresi linear berganda (*multiplier linier regression method*) yang dirumuskan sebagai berikut:

Persamaan regresi : $Y = a + a_1 X_1 + a_2 X_2 +$
 Dimana :
 Y = Pengalokasian Anggaran Belanja Modal
 a = Nilai Konstanta
_{1 dan 2} = Slop atau koefisien regresi
 X₁ = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 X₂ = Dana Alokasi Khusus (DAK)
 = error

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi adalah analisis yang digunakan untuk mempelajari cara bagaimana variabel-variabel yang ada saling berkaitan. Regresi linear juga digunakan sebagai alat statistik yang

dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap satu buah variabel. Variabel yang saling mempengaruhi disebut variabel bebas, variabel independen atau variabel penjelas.

Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik dilakukan untuk menguji keandalan dari persamaan regresi yang akan digunakan untuk menginterpretasikan pengaruh dari PAD dan DAK terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal Pemerintah Kota Manado. Analisis regresi pada dasarnya adalah studi ketergantungan variabel tak bebas (dependen) pada satu atau lebih variabel dengan maksud untuk menaksir rata-rata populasi atau rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui, dalam penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda dengan variabel dependen Belanja Modal, sedangkan variabel Independennya ialah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil Uji Multikolinearitas menyatakan bahwa tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10. Hasil uji VIF juga menunjukkan bahwa salah satu variabel independen yang memiliki VIF lebih dari 10. Sehingga dapat dikatakan bahwa dari kedua variabel yaitu X_1 dan X_2 tidak terjadi Multikolinearitas. Demikian juga berdasarkan hasil uji Heterokedastisitas yang dilihat pada output SPSS yang dapat dikatakan tidak terjadi Heterokedastisitas dalam persamaan ini.

Dari hasil pengujian *Kolmogorov-Smirnov* diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Data dari variabel PAD (X_1) memiliki nilai signifikan 0,880. Karena nilai signifikan lebih besar dari 0,005 maka dengan ini dinyatakan normal.
2. Data dari variabel DAK (X_2) memiliki nilai signifikan 0,734. Karena nilai signifikan lebih besar dari 0,005 maka dengan ini dinyatakan normal.
3. Data dari variabel Belanja Modal (Y) memiliki nilai signifikan 0,924. Karena nilai signifikan lebih besar dari 0,005 maka dengan ini dinyatakan normal.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa ketiga variabel tersebut mempunyai data yang berdistribusi normal.

Hasil analisis data untuk Hasil uji Autokorelasi diperoleh nilai DW sebesar 2,853. Apabila tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ untuk $n = 36$ dan $k = 1$ maka nilai d_U dan d_L untuk pengujian Autokorelasi adalah $d_U = 1,36$ dan $d_L = 0,70$. Pengujian untuk Uji Autokorelasi Pengaruh PAD dan DAK terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal menunjukkan bahwa hasil Pengaruh PAD dan DAK memenuhi syarat asumsi klasik Uji Autokorelasi $d_U < DW < 4-d_L$ ($1,36 < 2,853 < 2,3$) maka dapat dikatakan bahwa Uji Autokorelasi berada di daerah ragu-ragu.

Koefisien korelasi linear yang dimiliki oleh Pendapatan Asli Daerah X_1 (PAD) adalah sebesar 0,988 angka ini hampir mendekati satu (1), maka dapat dilihat bahwa PAD terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal memiliki hubungan linear sangat kuat. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh variabel X_2 (DAK) dimana angka yang memiliki DAK adalah sebesar 0,993 angka ini juga hampir mendekati satu (1) sehingga dapat dikatakan bahwa DAK terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal memiliki hubungan linear sangat kuat. Demikian halnya hubungan yang dimiliki oleh variabel X_1 dan X_2 terhadap BM, dimana dari hasil analisis data yang diperoleh nilai koefisien korelasi masing-masing sebesar 0,988 dan 0,993. Angka korelasi yang

dihasilkan menunjukkan angka positif (+) yang berarti bahwa hubungan dari variabel X_1 dan X_2 dengan variabel terikat BM (Belanja Modal) adalah searah.

Tabel 1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.997 ^a	.994	.991	.02422	2.853

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Hasil Olah Data, 2016

Tabel diatas dapat diketahui bahwa besarnya nilai koefisien determinasi (R square) adalah sebesar 0,994 atau sebesar 99,4%. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh PAD (X_1) dan DAK (X_2) terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal (Y) adalah sebesar 99,4% sedangkan sisanya sebesar 0,6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini.

$F_{hitung} = 324,483$ dan $F_{tabel} = 6,94$ dan nilai signifikan = 0,000. Karena F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} dan tingkat signifikan sebesar 0,00 jauh lebih kecil dari tingkat signifikan sebesar 0,05. Dengan demikian secara simulasi data seluruh variabel independen PAD dan DAK secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Uji F

Tabel 2. Uji F

ANOVA^a

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.381	2	.190	324.483	.000 ^b
	Residual	.002	4	.001		
	Total	.383	6			

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), DAK, PAD

Sumber: Hasil Olah Data, 2016

$H_a: X_1 X_2 > 0$ artinya bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) dan Dana Alokasi Khusus (X_2) secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Y). Pemerintah Kota Manado telah menggunakan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus sebagai pendanaan vital untuk dialokasikan pada Anggaran Belanja Modal dalam pencapaian tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yakni meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah.

Uji t

Tabel Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	9.820	1.406		6.984	.002		
	PAD	.203	.092	.391	2.211	.092	.049	20.479
	DAK	.510	.148	.611	3.452	.026	.049	20.479

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Hasil Olah Data, 2016

Dari hasil Uji t perhitungan statistik menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimasukkan dalam model signifikan tidak mempengaruhi alokasi anggaran belanja daerah dan variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) mempengaruhi alokasi anggaran belanja modal.

Variabel PAD menunjukkan tingkat signifikan sebesar 0,09 lebih besar dari tingkat signifikan 0,05 dan variabel DAK menunjukkan tingkat signifikan sebesar 0,02 lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05. Hasil estimasi model dapat ditulis dalam persamaan di bawah ini:

$$\text{Alokasi Anggaran Belanja Modal} = 9,820 + 0,203\text{PAD} + 0,510\text{DAK}$$

4. PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal yang dicapai oleh pemerintah Kota Manado tidak berpengaruh secara signifikan. Hal ini berarti bahwa perkembangan belanja modal belum bisa dipengaruhi oleh perkembangan pendapatan asli daerah yang terealisasi di Kota Manado.
2. Secara parsial Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dicapai pemerintah Kota Manado berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal yang terealisasi di Kota Manado. Hal ini juga berarti bahwa perkembangan belanja modal Kota Manado masih dipengaruhi oleh perkembangan Dana Alokasi Khusus.
3. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Hal ini dapat dikatakan PAD dan DAK yang dicapai oleh pemerintah Kota Manado berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan belanja modal yang dapat direalisasikan oleh pemerintah Kota Manado.

Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Kota Manado diharapkan perlu untuk memaksimalkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari berbagai unsur penerimaan daerah. Pemerintah Kota Manado harus lebih giat lagi dalam mengumpulkan data-data dari sumber-sumber didalamnya yang belum dioptimalkan sehingga bisa lebih meningkatkan PAD.
2. Begitu juga untuk Dana Alokasi Khusus agar pemerintah Kota Manado lebih mengupayakan dan mengoptimalkan kebutuhan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, pengembangan statistik dan penanaman modal.
3. Bagi penelitian selanjutnya disarankan agar memperluas variabel-variabel independen (PAD dan DAK) yang diduga mempengaruhi perkembangan belanja modal yang dapat direalisasikan suatu daerah dalam rangka perkembangan daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Paper Dalam Jurnal

- [1] Uhise, Stevani, 2013. "Dana Alokasi Umum (DAU) Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening." *Jurnal EMBA*: Vol.1 (4): Hal. 1677–1686.

Buku

- [2] Budiarti, Pipit, 2013. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Struktur Belanja Daerah". *E-Jurnal Universitas Brawijaya. Jawa Timur*.

- [3] Gugus, Arbie, 2013. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal“. *E-Jurnal Universitas Negeri Semarang. Semarang.*
- [4] Mahsun, 2013. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAK) Terhadap Alokasi Belanja Daerah”. *E-Jurnal Universitas Diponegoro. Semarang.*
- [5] Mardiasmo, MBA, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Gudang Penerbit: Penerbit Andi Publisher.
- [6] Raharjo, Adisasmita, 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Jakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- [7] Rudianto, 2012. *Pengantar Akuntansi – Adaptasi IFRS*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- [8] Sugiono, Arif, 2015. *Akuntansi – Informasi Dalam Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Penerbit Grasindo Hal. 214.
- [9] Yawa, Herman, 2015. “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal di Kota Manado”. *Jurnal Universitas Sam Ratulangi Manado.*